

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM MENANGANI KEKERINGAN DI KARAWANG BAGIAN SELATAN (Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Karawang)

Linda Mutiara Sandi¹, Lina Aryani², Dr.Cucu Sugiarti³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Singaperbangsa Karawang.
Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 13 Juni 2022 Publish : 16 July 2022</p>	<p><i>This This research journal describes government management in dealing with drought in Southern Karawang. The problem in this research is the problem of drought that occurs in two sub-districts of Karawang Regency, namely, Tegal Waru District and Pangkalan District, the long and severe drought makes it difficult for residents of the sub-district every day to get clean water for their daily needs. The type of research used by the researcher is qualitative research with data collection techniques in the form of direct observation, interviews, and documentation. Based on this research, it can be concluded that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Karawang Regency has implemented all management functions in dealing with drought problems in Southern Karawang, both from planning, organizing, directing, and supervising.</i></p>
<p>Keywords: Government Management, Drought, Regional Disaster Management Agency</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Sejarah Artikel: Diterima : 13 Juni 2022 Publis : 16 July 2022</p>	<p>Artikel Jurnal penelitian ini mendeskripsikan tentang manajemen pemerintahan dalam menangani kekeringan di Karawang Bagian Selatan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah permasalahan kekeringan yang terjadi di dua Kecamatan Kabupaten Karawang yaitu, Kecamatan Tegal waru dan Kecamatan Pangkalan, kekeringan yang terjadi cukup lama dan parah membuat warga kecamatan tersebut setiap harinya kesulitan mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang sudah menerapkan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen dalam menangani permasalahan kekeringan di Karawang Bagian Selatan, baik dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasannya.</p>
<p>Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p>	
<p>Corresponding Author: Linda Mutiara Sandi Universitas Singaperbangsa Karawang Email: imutiara558@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Menurut geologinya, Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk lahan yang lengkap, mulai dari gunung, lereng, sabana, dan marine atau wilayah pantai.

Hal tersebut menyebabkan di Indonesia sering kali terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung yang disebabkan oleh pergeseran lempeng, bencana tanah longsor akibat dari topografi yang beragam dan alih fungsi lahan, serta kekeringan yang disebabkan oleh pemanasan global, sudah mulai rusaknya alam, dan suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada.

Setiap tahun di beberapa bagian di Indonesia terjadi bencana kekeringan, seperti kekeringan yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tiga tahun yang lalu tepatnya tahun 2019. Kekeringan tersebut terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Tegal Waru dan Kecamatan Pangkalan Karawang yang terhitung cukup lama dan parah akibat musim kemarau panjang.

Dalam catatan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Karawang, kemarau panjang ini menyebabkan sekitar seribu orang lebih di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan air bersih dan memaksa sebagian warga berjalan kaki sepanjang 7 kilometer mencari aliran sungai Cibeet untuk kebutuhan mandi dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu kekeringan juga menyulitkan para petani di beberapa daerah karena bagaimanapun air merupakan hal yang sangat krusial untuk kehidupan, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya, jadi ketika pasokan air di suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup penduduknya pasti masyarakat akan merasa sangat kesulitan dan juga dapat berdampak pada kesehatan manusia seperti dapat munculnya wabah penyakit diare, penyakit kulit, dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan tindakan penanggulangan dan pencegahan untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Pemerintah dalam menangani kekeringan di Karawang bagian selatan (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang).

Manajemen dan Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam Bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Istianto dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik* mengatakan bahwa, manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. (Istianto, 2011: 29)

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan. Menurut G. R. Terry dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen*, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)
4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen menurut G. R. Terry. Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun SDB. Sebelum digunakan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut. (Ndraha, 2015: 160).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan sesuatu untuk

memperdalam dan menghasilkan kesimpulan dari suatu gejala atau masalah yang diteliti. Menurut (Moleong, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi atau motivasi dan lain sebagainya secara holistik yang selanjutnya data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Sementara, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dan lokasi yang terdampak kekeringan dan wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu Sekertaris BPBD Kabupaten Karawang, Sekertaris Desa Cintawangi, Kasi. Bagian Pemerintahan Desa Citalanggeng, dan 2 orang warga Kecamatan Tegal waru.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, Peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu Manajemen Pemerintah dalam Menangani Kekeringan Di Karawang Bagian Selatan (Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang). Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

3.1. Perencanaan pemerintah terkait dalam menangani kekeringan di Karawang bagian selatan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang, memaparkan mengenai perencanaan pemerintah terkait dalam menangani kekeringan di Karawang bagian selatan. Perencanaan yang dilakukan pemerintah melalui BPBD Kabupaten Karawang yaitu terus mendistribusikan air kepada warga di Kecamatan Tegalwaru dan kecamatan lain yang juga mengalami kekeringan dan merencanakan proyek pipanisasi dengan mencari sumber air yang bisa dialiri untuk proyek pipanisasi ini. Selain itu, tahun 2020 pemerintah juga merencanakan untuk membangun bendungan di Kabupaten Karawang bagian Selatan guna penanganan jangka panjang, karena daerah tersebut sudah menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.

3.2. Pengorganisasian dalam pemerintahan guna menangani masalah kekeringan di Karawang bagian selatan.

Hasil wawancara selanjutnya menghasilkan pendapat dari pemerintah. Pertama, yaitu Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang, Beliau menginformasikan bahwasanya pengorganisasian dalam BPBD Kabupaten Karawang yaitu mendata wilayah yang mengalami kekeringan kemudian mengirim bantuan, serta mengajukan perencanaan kepada Bupati Karawang dalam mengatasi kekeringan di Karawang bagian Selatan. Kedua, pemerintah desa yaitu Sekretaris Desa Cintawangi, Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Desa Kutalanggeng memiliki pendapat yang sama dalam pengorganisasian pemerintah guna menangani masalah kekeringan di Karawang bagian selatan. Yaitu masing – masing desa yang mengalami kekeringan mengajukan permohonan air bersih kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah desa bersama aparatur desa lainnya melakukan pengawasan ketika sumbangan air bersih diberikan kepada warga.

3.3. Pengarahan dari pemerintah terkait dalam menangani kekeringan di Karawang bagian selatan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang, mengarahkan kepada masyarakat untuk menanam pohon dalam menjaga siklus air yang ada di Karawang. Pohon merupakan bagian penting dari proses siklus air yang terjadi, pohon memindahkan air dari tanah ke atmosfer melalui penguapan yang secara teknis disebut transpirasi. Transpirasi adalah proses perubahan air menjadi uap air, yang naik ke udara melalui jaringan hidup tumbuh – tumbuhan, yaitu yang bisa melalui stomata daun. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jumlah pohon yang banyak dapat menjadikan proses transpirasi

akan berjalan baik sehingga siklus air berjalan baik pula dan menghasilkan curah hujan yang teratur.

Sedangkan pengarahan dari pemerintah desa sekitar yaitu Desa Cintawargi, Desa Citalanggeng dan Desa Kutalanggeng. Pemerintah desa tersebut mengarahkan arahan yang sama, yaitu untuk sama – sama menjaga alam sekitar dengan tidak menebang pohon serta membuang puntung rokok sembarangan, karena dimusim kemarau ini hutan menjadi gersang dan mudah terbakar hanya dengan puntung rokok saja.

3.4. Pengawasan dari pemerintah terkait guna mencegah bencana tersebut datang lagi dikemudian hari

Pada bagian ini Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang bekerja sama dengan PDAM Tirta Tarum dalam memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain BPBD Kabupaten Karawang, pemerintah desa setempat juga mengawasi jalannya pembagian air bersih kepada masyarakat, baik bantuan air dari pemerintah maupun dari PT yang ada di sekitar lokasi kekeringan.

Pemerintah khususnya BPBD Kabupaten Karawang juga mendata berapa banyak keluarga yang mengalami dampak dari kekeringan, yaitu sebanyak 855 Kepala Keluarga di desa Kutalanggeng, 358 Kepala Keluarga di desa Citalanggeng dan 285 Kepala Keluarga di desa Cintawargi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui mana yang lebih terdampak sehingga dalam pendistribusian air bersih lebih didahulukan tapi tetap merata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait manajemen pemerintahan dalam menangani kekeringan di karawang bagian selatan studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dapat ditarik kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Karawang sudah menerapkan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengawasan.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penanganan kekeringan di karawang bagian selatan. Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dalam proses sosialisasi penanggulangan kekeringan, sosialisasi pentingnya menanam pepohonan, dan lain sebagainya. Selain itu, BPBD Kabupaten Karawang juga harus memastikan kepastian program perencanaan jangka panjang dalam mengatasi kekeringan. Kedua, Pemerintah Desa harus memberikan masukan program dan kebijakan yang dianggap dapat menangani permasalahan kekeringan di desanya dan selalu mengawasi program yang sedang direncanakan atau sedang dijalankan agar program tersebut berjalan dengan baik. Ketiga, masyarakat harus senantiasa selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan menjaga kelestarian gunung dan pohon dan tidak membiarkan apabila ada yang mencoba merusak gunung, hutan, dan pepohonan yang ada disekitar. Selain itu masyarakat juga harus turut membantu program pemerintah dalam menangani kekeringan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat karunianya peneliti bisa menyelesaikan jurnal ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan jurnal ini. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman semua menjadi ladang pahala yang nanti menjadi tabungan kawan-kawan di akhirat kelak. Sekali lagi peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Kusuma, Nilla. (2019). Dua Kecamatan Di Karawang Kekeringan Parah. Diakses dari URL: <https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/8671/dua-kecamatan-di-karawang-kekeringan-parah>.

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, Fungsi-Fungsi Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sasmita, Sucianty. (2017). *Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Diakses dari URL: <https://slideplayer.info/slide/11906836/>. Pada 31 Mei 2022
- Suharyadi, Harry, dkk. (2016). *Manajemen Pemerintahan dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015*. 2(2): 241-244.